



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Maret 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH KONSTITUSI  
**UNIT KERJA** : KEPANITERAAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MUHIDIN
2. Jabatan : PANITERA
3. NHK : 112637

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 6.023.300.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 183 m2/162 m2 di KOTA JAKARTA BARAT , WARISAN Rp. 1.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 209 m2/20 m2 di KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.757.000.000
3. Tanah Seluas 121 m2 di KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.302.000.000
4. Tanah Seluas 139 m2 di KOTA JAKARTA BARAT , HIBAH TANPA AKTA Rp. 730.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/1 m2 di KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
6. Tanah Seluas 100 m2 di KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 384.300.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 203.500.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 30.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.039.604.709**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 7.296.404.709



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 7.296.404.709

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.